

Nomor : 70/Surat Terbuka_JSKK/II/2009

Hal : **Jangan Pilih Calon Anggota Legislatif (Caleg) Pelanggar HAM**

Kepada Yth,

Presiden Republik Indonesia

Bapak Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono

Di –Jakarta

Kami keluarga korban yang tergabung dalam JSKK beserta segenap pemuda, mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pemajuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia kembali berdiri didepan Istana Negara yang kami cintai. Seperti sering kami sampaikan sebelumnya, saat ini perjuangan untuk menggapai keadilan bagi kami, keluarga korban pelanggaran HAM berat terasa semakin sulit. Hambatan dan tantangan terus menghadang dan menguji semangat perjuangan kami. Bulan April 2009, segenap rakyat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), sejauh ini kami belum memiliki optimisme yang cukup, mengingat masih banyaknya pelaku pelanggaran HAM yang berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan cara mendirikan partai politik sebagai kendaraan politik dan menjadi caleg, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Sederet pekerjaan rumah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masih menumpuk hingga saat ini, diantaranya peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1983-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, peristiwa Tanjung Priok 1984, Penculikan dan Penghilangan paksa Aktivis 1997-1998, Tragedi Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, pembunuhan aktivis HAM Munir, Wasior Wamena, Tragedi Abepura di Papua dan sebagainya yang tidak akan muat untuk kami sebutkan satu persatu disini. Saat ini pemerintahan bapak Presiden SBY tinggal menghitung hari, namun belum juga mampu menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan diatas, terutama kewajiban untuk memulihkan hak korban. Komitmen dan janji yang pernah disampaikan bapak presiden, ternyata belum mampu ditindaklanjuti secara kongkrit, padahal jika proses hukum dan mekanisme peradilan berjalan efektif dengan dukungan politik yang nyata, tentu para pelanggaran HAM berat tersebut tidak akan melenggang mulus kedalam bursa kekuasaan melalui proses pemilu 2009, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan HAM terlebih dahulu.

Atas dasar tersebut, JSKK sebagai sebuah organisasi korban akan terus bergiat untuk membangun gerakan dan kesadaran politik HAM sehingga masyarakat tidak lagi – lagi menjadi obyek kampanye yang mengesampingkan pendidikan dan kesadaran politik. Sudah saatnya rakyat disadarkan dari kebutaan dan kebodohan politik, sehingga mampu *menyortir* para politisi pelanggaran HAM agar tidak kembali berkuasa di negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi kami tegaskan, disisa waktu yang ada dan ditengah kesibukan berkampanye demi mempertahankan dan merebut kekuasaan, kami berharap pemerintah tetap konsisten mendorong dan memastikan proses hukum penuntasan kasus pelanggaran HAM berat berjalan secara maksimal

Jakarta, 12 Februari 2009

Hormat kami,

JSKK

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada :

1. Menteri Sekretaris Negara RI
2. Komnas HAM RI